

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Sukris Sarmadis, 2009 “*Advokat*” Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini, Mandar Maju, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution, 2009, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Mandar Maju , Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Firman Candra, 2019, *Paralegal Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum Cet ke-3*, Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing , Jakarta.
- Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hendra Sutisna, 2006, *Frundaising Data Base*, Piramedia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta.
- Metthew B miles A michael huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Mulyana W Kusumah, 1991, *Paradigma Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.

Rianda Seprasia, 2008, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

C. Sumber Lain

Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional", Bantuan hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Volume 11, Nomor 2, Juni 2014*.

Wirawan, *Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara, Makalah dalam Pelatihan Paralegal yang dilaksanakan oleh DPD SPTSK, Jawa Barat, di Bandung tanggal 15 Juli 2003*.

Yusuf Saefudin, 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum*".